

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DI SELURUH PROVINSI INDONESIA

Henny Agnecia Uliarta Simbolon

Christophorus Heni Kurniawan

Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: iwan@fe.uajy.ac.id

Abstract

The accountability of the local government to the community can be demonstrated through the Financial Statements of Local Government (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD). Financial Statements are basically the result of an accounting process that can be used as a communication tool between a company with parties who interested to the company activities (Munawir, 2004). Presenting the Financial Statements of Local Government based on Government Accounting Standards (Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) is one concrete effort that can realized a clean and responsible government. This study was conducted to examine the effect of local government size, legislative size, local government wealth, intergovernmental revenue, administrative age, functional differentiation, job specialization and financial independence ratio to the level of financial statement disclosure throughout the Province of Indonesia.

The sample used in this study is the Financial Statements of Local Government throughout the Province of Indonesia in 2013-2015. Sampling technique in this research use purposive sampling. Criteria in sampling of this study is the Financial Statements of Local Governments throughout the Province of Indonesia published from 2013 to 2015 and contains data required as a research variable. Multivariate regression is used to analyze data.

The results showed that the local government size has a positive effect on the level of financial statement disclosure. Intergovernmental revenue and financial independence ratio have a negative effect on level of financial statement disclosure. Legislative size, local government wealth, administrative age, functional differentiation and job specialization have no effect on the level of financial statements disclosure.

Keywords: *Government size, legislative size, local government wealth, intergovernmental revenue, administrative age, functional differentiation, job specialization, financial independence ratio, and financial statement disclosure.*

1. Pendahuluan

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995). Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam pelaksanaan keuangan daerah dibutuhkan pencatatan dan pelaporan yang merupakan bagian dari Akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-undang Republik Indonesia dari Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah. Kemudian diganti dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lesmana (2010) menyatakan bahwa dua variabel karakteristik pemerintah daerah secara positif dan signifikan mempengaruhi pengungkapan wajib LKPD. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ratnasari (2016) menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD provinsi. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) yang menunjukkan bahwa hasil regresi menunjukkan bahwa hanya jumlah anggota DPRD yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam neraca. Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyatakan bahwa sembilan variabel yang diuji, hanya empat variabel independen yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD pada tahun 2008-2009, yaitu ukuran legislatif, umur administratif pemda, kekayaan pemda, dan *intergovernmental revenue*. Penelitian yang dilakukan oleh Girsang dan Yuyetta (2015) menunjukkan bahwa tidak satupun dari variabel yang diuji yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.

.Berdasarkan hasil dari pengukuran penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik pemerintah daerah yang berbeda, maka peneliti termotivasi melakukan penelitian dan menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) dengan objek yang berbeda yaitu “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Provinsi Indonesia”. Pemilihan objek tersebut karena untuk menguji apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah diterapkan pada pemerintah daerah Seluruh Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia ?
2. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia ?

3. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia ?
4. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia ?
5. Apakah umur administratif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia ?
6. Apakah *diferensiasi fungsional* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia ?
7. Apakah spesialisasi Pekerjaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia ?
8. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali model dan variabel dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Di Seluruh Provinsi Indonesia.

2. Landasan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan total aset. Sumarjo (2010) dan Lesmana (2010) menggunakan total aset Pemerintah daerah sebagai proksi untuk variabel ukuran Pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Patrick (2007) menemukan bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap penerapan sebuah inovasi baru. Ratnasari (2016) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD provinsi. Semakin besar ukuran Pemerintah Daerah maka semakin besar tuntutan masyarakat untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah secara lengkap. Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

Ha₁: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

2.2. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD bertugas mengawasi pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik.

Winarna dan Murni (2007) menyatakan bahwa lembaga legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang memiliki potensi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menemukan bahwa jumlah anggota DPRD yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam neraca. Oleh karena itu, semakin banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan semakin dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sehingga adanya peningkatan pada pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

Ha₂: Ukuran Legislatif Berpengaruh Positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.

2.3. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Kekayaan suatu daerah merupakan sejauh mana tingkat kesejahteraan suatu daerah (Sinaga, 2011). Lasward, *et al* (2005) berpendapat bahwa kekayaan pemerintah daerah berhubungan positif dengan meningkatnya pengungkapan karena memberikan sinyal dari kualitas kepala daerah, dimana kepala daerah dapat mengambil manfaat dengan meningkatkan kesempatan mereka dipilih kembali dan mengurangi biaya kepentingan. Hasil penelitian yang dilakukan Liestiani (2008) bahwa kekayaan daerah berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar kekayaan pemerintah daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya. Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

Ha3: Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

2.4. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Intergovernmental Revenue adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program daerah (Nam, 2001 dalam Sumarjo, 2010). Patrick (2007) mendefinisikan *intergovernmental revenue* adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Suhardjanto *et al* (2010) menemukan bahwa adanya pengaruh positif *intergovernmental revenue* terhadap kesesuaian pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin besar tingkat ketergantungan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari uraian diatas, hipotesis penelitian ini adalah:

Ha4: *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

2.5. Pengaruh Umur Administratif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Umur pemerintah daerah adalah seberapa lama pemerintah daerah itu ada (Mandasari, 2009). Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lebih lama akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan SAP. Dengan demikian, semakin besar umur administratif pemerintahan daerah maka penyajian dalam laporan keuangan akan semakin baik. Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

Ha5: Umur Administratif Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.

2.6. Pengaruh *Diferensiasi Fungsional* terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Diferensiasi fungsional menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi dibagi menjadi departemen fungsional. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, pembagian departemen fungsional direpresentasikan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan Pemda. Semakin banyak jumlah SKPD yang dimiliki berarti semakin kompleks pemerintahan tersebut, sehingga semakin besar tingkat pengungkapan yang harus dilakukan. Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

Ha6: *Diferensiasi Fungsional* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

2.7. Pengaruh Spesialisasi Pekerjaan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Spesialisasi pekerjaan biasanya diukur menurut tingkat pendidikan formal anggota. Penelitian yang dilakukan Suhardjanto *et al* (2010) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan bupati merupakan prediktor yang signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan SAP yang wajib. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan formal anggota spesialisasi pekerjaan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari uraian diatas, hipotesis penelitian ini adalah:

Ha₇: Spesialisasi Pekerjaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

2.8. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah Daerah untuk tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat (Dwirandra, 2008). Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan semakin tinggi pula tuntutan transparansi atas pengungkapan dan pelaporan keuangan (Dwirandra 2008). Dengan demikian, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pengungkapan yang dilakukan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha₈: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Provinsi Indonesia” merupakan penelitian empiris. Menurut Hartono (2013), penelitian empiris berarti penelitian menggunakan fakta yang objektif, secara hati-hati diperoleh, benar-benar terjadi, tidak tergantung dari kepercayaan atau nilai-nilai peneliti maupun kepercayaan orang lain.

3.2. Obyek Penelitian

Objek yang dipilih untuk penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Seluruh Provinsi di Indonesia.

3.3. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Seluruh Provinsi Indonesia.

3.4. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Seluruh Provinsi Indonesia periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Hartono (2013) pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Provinsi Indonesia yang dipublikasikan dari tahun 2013 sampai 2015 serta memuat data-data yang diperlukan sebagai variabel penelitian.

3.5. Variabel Penelitian

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah Karakteristik Pemerintah Daerah.

3.6. Operasionalisasi Variabel

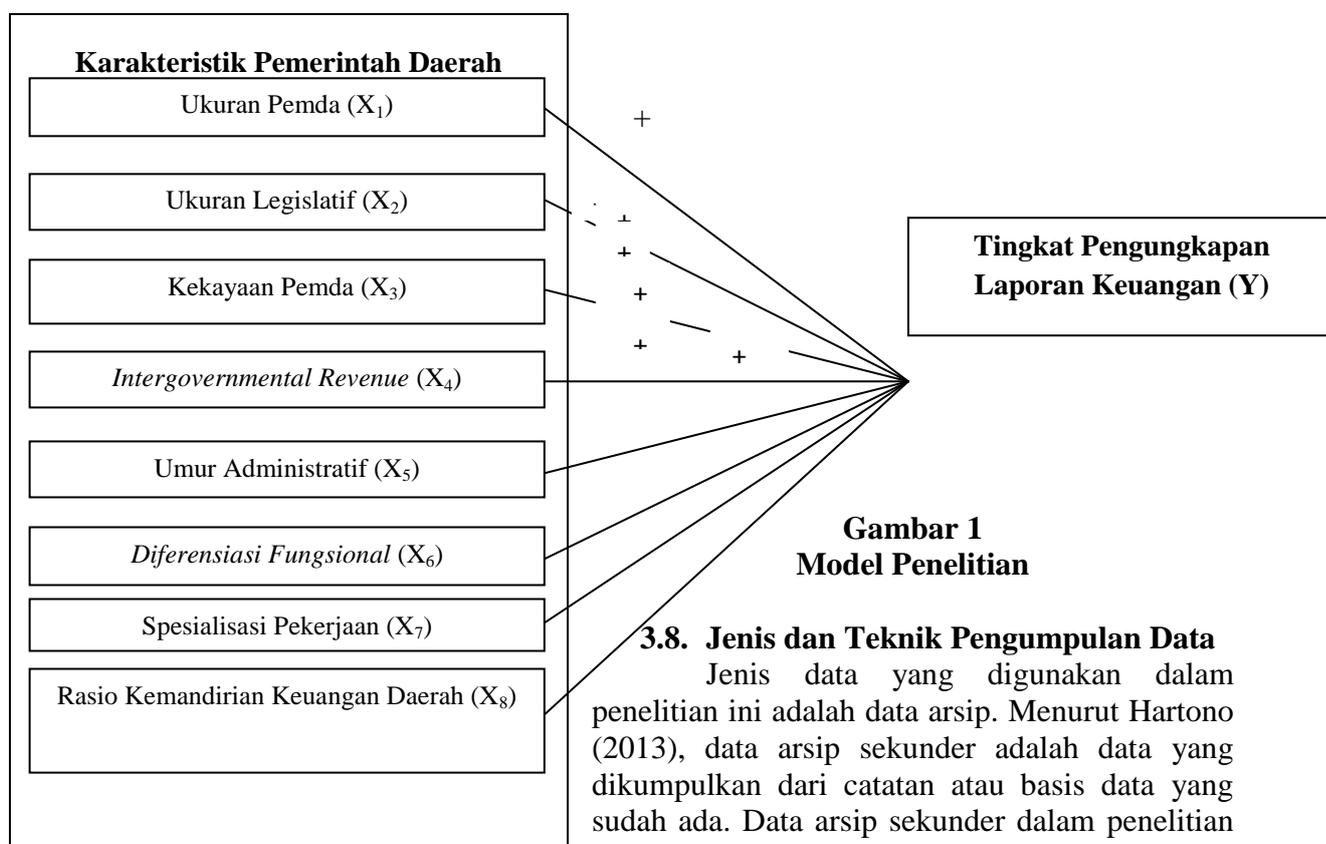
Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Dimensi	Elemen	Tipe Data
Ukuran Pemerintah Daerah (X_1)	Ukuran Pemerintah Daerah merupakan salah satu elemen dari struktur organisasi (Patrick, 2007).	SIZE	Natural Logaritma Total Aset	Rasio
Ukuran Legislatif (X_2)	Ukuran legislatif atau DPRD merupakan pengukuran lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (Winarna dan Murni, 2007)	DPRD	Jumlah anggota DPRD	Rasio
Kekayaan Pemerintah Daerah (X_3)	Kekayaan Pemerintah Daerah merupakan tingkat kemakmuran daerah tersebut. (Sinaga, 2011).	WEALTH	Natural logaritma pendapatan asli daerah (PAD)	Rasio
<i>Intergovernmental Revenue</i> (X_4)	<i>Intergovernmental revenue</i> merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat (Sumarjo 2010).	IRGOV	Total dana perimbangan berbanding total pendapatan.	Rasio
Umur Administratif (X_5)	Umur pemerintah daerah adalah seberapa lama pemerintah daerah itu ada (Mandasari, 2009).	AGE	Umur Pemda berdasarkan Undang-Undang pembentukan masing-masing pemda	Rasio
<i>Diferensiasi Fungsional</i> (X_6)	<i>Diferensiasi fungsional</i> menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi dibagi menjadi departemen fungsional. (Hilmi, 2010).	SKPD	Jumlah unit SKPD (satuan kerja perangkat daerah)	Rasio
Spesialisasi Pekerjaan (X_7)	Spesialisasi pekerjaan adalah pembagian kerja berdasarkan oleh keahlian atau ketrampilan khusus. (Patrick, 2007)	SPES	Variabel <i>dummy</i> ; jika latar belakang Kepala daerah dan/atau Wakilnya adalah ekonomi, maka bernilai 1. Jika bukan berlatar belakang ekonomi maka bernilai 0.	Nominal
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_8)	Rasio kemandirian keuangan daerah adalah untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah Daerah untuk tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana	MANDIR I	Pendapatan Asli Daerah berbanding dengan jumlah total pendapatan	Rasio

	perimbangan dari pemerintah pusat (Dwirandra 2008).			
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Y)	Tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh penilaian (<i>judgment</i>) manajer. (Trueman and Titman, 1998).	<i>DISC</i>	Jumlah item yang <u>diungkapkan</u> Total item yang harus diungkapkan X 100%	Rasio

3.7. Model Penelitian

Menurut Hartono (2013), model adalah bentuk simbol dari suatu teori. Bentuk simbol dari model ini harus menunjukkan hubungan kausal antara variabel-variabel di dalam model.



Gambar 1
Model Penelitian

3.8. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data arsip. Menurut Hartono (2013), data arsip sekunder adalah data yang dikumpulkan dari catatan atau basis data yang sudah ada. Data arsip sekunder dalam penelitian ini berupa data arsip laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013 sampai dengan 2015 yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (www.keuda.kemendagri.go.id).

4. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, kekayaan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, umur administratif, *diferensiasi fungsional*, spesialisasi pekerjaan dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia. Berdasarkan kriteria sampel penelitian diperoleh 19 provinsi. Berikut ini proses pengambilan sampel penelitian:

Tabel 2
Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	34
Tidak diperoleh data aset dan kewajiban pemerintah daerah	(15)
Jumlah Sampel	19
Jumlah data observasi (19 provinsi x 3 tahun)	57

4.1. Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, kekayaan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, umur administratif, *diferensiasi fungsional*, spesialisasi pekerjaan, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil uji statistik deskriptif penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah Daerah	57	20.75	33.68	25.4430	3.34977
Ukuran Legislatif	57	40.00	106.00	66.0526	21.77517
Kekayaan Pemerintah Daerah	57	23.90	31.33	28.4612	1.57318
Intergovernmental Revenue	57	.11	1.95	.5908	.29113
Umur Administratif	57	13.00	810.00	90.8947	171.59605
Diferensiasi Fungsional	57	22.00	55.00	40.2105	10.67497
Spesialisasi Pekerjaan	57	.00	1.00	.1053	.30962
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	57	.00	35.32	1.5709	5.27325
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan	57	.27	.47	.3832	.04927
Valid N (listwise)	57				

Sumber: olah data, 2017

4.2. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi uji *Kolmogorov Smirnov* penelitian ini sebesar 0,999. Nilai signifikansi $> 0,05$ menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

4.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berikut ini hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi

No	Uji	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Uji Multikolinearitas	Nilai VIF (<i>Variance Inflation Factor</i>) semua variabel kurang dari 10 dan nilai <i>Tolerance</i> semua variabel lebih dari 0,1.	Tidak terjadi multikolinearitas
2	Uji Heteroskedastisitas	Nilai probabilitas variabel independen lebih dari 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

3	Uji Autokorelasi	Nilai Durbin Watson(1,965) terletak antara DU (1,903) sampai 4-DU (2,097).	Tidak terjadi autokorelasi.
---	------------------	--	-----------------------------

4.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Uji Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,262	0,127		2,062	0,045
Ukuran Pemerintah Daerah	0,005	0,002	0,319	2,224	0,031
Ukuran Legislatif	-0,001	0,000	-0,284	-1,587	0,119
Kekayaan Pemerintah Daerah	0,004	0,005	0,127	0,769	0,446
<i>Intergovernmental Revenue</i>	-0,071	0,021	-0,420	-3,375	0,001
Umur Administratif	0,00005	0,000	0,187	1,507	0,138
<i>Diferensiasi Fungsional</i>	-0,001	0,001	-0,137	-0,934	0,355
Spesialisasi Pekerjaan	-0,005	0,021	-0,033	-0,258	0,798
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	-0,004	0,001	-0,407	-3,716	0,001
F hitung	5,308				
Sig. F	0,000				
<i>Adj R Square</i>	0,366				

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 0,262 + 0,005X_1 - 0,001X_2 + 0,004X_3 - 0,071X_4 + 0,00005X_5 - 0,001X_6 - 0,005X_7 - 0,004X_8$$

Keterangan :

- Y = Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan
- X₁ = Ukuran Pemerintah Daerah
- X₂ = Ukuran Legislatif
- X₃ = Kekayaan Pemerintah Daerah
- X₄ = *Intergovernmental revenue*
- X₅ = Umur Administratif
- X₆ = *Diferensiasi Fungsional*
- X₇ = Spesialisasi Pekerjaan
- X₈ = Rasio kemandirian keuangan daerah

a. Uji Nilai t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

1) Ukuran Pemerintah Daerah

Hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,005, nilai t hitung sebesar 2,224 dan nilai probabilitas sebesar 0,031. Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai t_{tabel} penelitian ini adalah 2,011. Hasil analisis menunjukkan t hitung (2,224) > t tabel (2,011) artinya Ha diterima, yaitu ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Pengujian nilai t juga dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas dengan α . Jika nilai probabilitas $\leq 5\%$ dan $\beta > 0$ maka hipotesis diterima sebaliknya jika nilai probabilitas $> 5\%$ dan $\beta \leq 0$ maka hipotesis ditolak. Nilai probabilitas variabel ukuran pemerintah daerah sebesar 0,031 dan koefisien regresi sebesar 0,005. Jika nilai probabilitas $< 5\%$ dan $\beta > 0$ maka hipotesis diterima, artinya ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

2) Ukuran Legislatif

Nilai koefisien regresi variabel ukuran legislatif sebesar -0,001, nilai t hitung sebesar -1,587 dan nilai probabilitas sebesar 0,119. Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai t_{tabel} penelitian ini adalah 2,011. Hasil analisis menunjukkan t hitung (-1,587) $< t$ tabel (2,011) artinya Ha ditolak, yaitu ukuran legislatif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Pengujian nilai t juga dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas dengan α . Jika nilai probabilitas $\leq 5\%$ dan $\beta > 0$ maka hipotesis diterima sebaliknya jika nilai probabilitas $> 5\%$ dan $\beta \leq 0$ maka hipotesis ditolak. Nilai probabilitas variabel ukuran legislatif sebesar 0,119 dan koefisien regresi sebesar -0,001. Nilai probabilitas $> 5\%$ maka hipotesis ditolak, artinya ukuran legislatif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

3) Kekayaan Pemerintah Daerah

Nilai koefisien regresi variabel kekayaan pemerintah daerah sebesar 0,004, nilai t hitung sebesar 0,769 dan nilai probabilitas sebesar 0,446. Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai t_{tabel} penelitian ini adalah 2,011. Hasil analisis menunjukkan t hitung (0,769) $< t$ tabel (2,011) artinya Ha ditolak, yaitu kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Pengujian nilai t juga dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas dengan α . Jika nilai probabilitas $\leq 5\%$ dan $\beta > 0$ maka hipotesis diterima sebaliknya jika nilai probabilitas $> 5\%$ dan $\beta \leq 0$ maka hipotesis ditolak. Nilai probabilitas variabel kekayaan pemerintah daerah sebesar 0,446 dan koefisien regresi sebesar 0,004. Nilai probabilitas $> 5\%$ maka hipotesis ditolak, artinya kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

4) Intergovernmental Revenue

Nilai koefisien regresi variabel *intergovernmental revenue* sebesar -0,071, nilai t hitung sebesar -3,375 dan nilai probabilitas sebesar 0,001. Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai t_{tabel} penelitian ini adalah 2,011. Hasil analisis menunjukkan t hitung (-3,375) $< t$ tabel (2,011) artinya Ha ditolak, yaitu *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Pengujian nilai t juga dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas dengan α . Jika nilai probabilitas $\leq 5\%$ dan $\beta > 0$ maka hipotesis diterima sebaliknya jika nilai probabilitas $> 5\%$ dan $\beta \leq 0$ maka hipotesis ditolak. Nilai probabilitas variabel *intergovernmental revenue* sebesar 0,001 dan koefisien regresi sebesar -0,071. Nilai probabilitas $< 5\%$ dan $\beta < 0$ maka hipotesis ditolak, artinya *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

5) Umur Administratif

Nilai koefisien regresi variabel umur administratif sebesar 0,00005, nilai t hitung sebesar 1,507 dan nilai probabilitas sebesar 0,138. Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai t_{tabel} penelitian ini adalah 2,011. Hasil analisis menunjukkan t hitung (1,507) $< t$ tabel

(2,011) artinya H_a ditolak, yaitu umur administratif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Pengujian nilai t juga dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas dengan α . Jika nilai probabilitas $\leq 5\%$ dan $\beta > 0$ maka hipotesis diterima sebaliknya jika nilai probabilitas $> 5\%$ dan $\beta \leq 0$ maka hipotesis ditolak. Nilai probabilitas variabel umur administratif sebesar 0,138 dan koefisien regresi sebesar 0,00005. Nilai probabilitas $> 5\%$ maka hipotesis ditolak, artinya umur administratif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

6) *Diferensiasi Fungsional*

Nilai koefisien regresi variabel *diferensiasi fungsional* sebesar -0,001, nilai t hitung sebesar -0,934 dan nilai probabilitas sebesar 0,355. H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai t_{tabel} penelitian ini adalah 2,011. Hasil analisis menunjukkan t hitung (-0,934) $< t$ tabel (2,011) artinya H_a ditolak, yaitu *diferensiasi fungsional* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Pengujian nilai t juga dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas dengan α . Jika nilai probabilitas $\leq 5\%$ dan $\beta > 0$ maka hipotesis diterima sebaliknya jika nilai probabilitas $> 5\%$ maka hipotesis ditolak. Nilai probabilitas variabel *diferensiasi fungsional* sebesar 0,355 dan koefisien regresi sebesar -0,001. Nilai probabilitas $> 5\%$ maka hipotesis ditolak, artinya *diferensiasi fungsional* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

7) *Spesialisasi Pekerjaan*

Nilai koefisien regresi variabel spesialisasi pekerjaan sebesar -0,005, nilai t hitung sebesar -0,258 dan nilai probabilitas sebesar 0,798. H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai t_{tabel} penelitian ini adalah 2,011. Hasil analisis menunjukkan t hitung (-0,258) $< t$ tabel (2,011) artinya H_a ditolak, yaitu spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Pengujian nilai t juga dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas dengan α . Jika nilai probabilitas $\leq 5\%$ dan $\beta > 0$ maka hipotesis diterima sebaliknya jika nilai probabilitas $> 5\%$ maka hipotesis ditolak. Nilai probabilitas variabel spesialisasi pekerjaan sebesar 0,798 dan koefisien regresi sebesar -0,005. Nilai probabilitas $> 5\%$ maka hipotesis ditolak, artinya spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

8) *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*

Nilai koefisien regresi variabel rasio kemandirian keuangan daerah sebesar -0,004, nilai t hitung sebesar -3,716 dan nilai probabilitas sebesar 0,001. H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai t_{tabel} penelitian ini adalah 2,011. Hasil analisis menunjukkan t hitung (-3,716) $< t$ tabel (2,011) artinya H_a ditolak, yaitu *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Pengujian nilai t juga dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas dengan α . Jika nilai probabilitas $\leq 5\%$ dan $\beta > 0$ maka hipotesis diterima sebaliknya jika nilai probabilitas $> 5\%$ maka hipotesis ditolak. Nilai probabilitas variabel rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,001 dan koefisien regresi sebesar -0,004. Nilai probabilitas $< 5\%$ dan $\beta < 0$ maka hipotesis ditolak, artinya rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

b. Uji Nilai F (*Goodness of Fit Test*)

Uji nilai F digunakan untuk mengukur *Goodness of Fit* dari model persamaan regresi yang digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Menurut Ghozali (2011), uji nilai F juga digunakan untuk melihat secara

keseluruhan apakah variabel independen signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian nilai F adalah jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 diterima. Nilai F_{hitung} penelitian ini adalah 5,038. Nilai F_{tabel} penelitian ini adalah 2,14. Nilai F_{hitung} (5,038) $>$ F_{tabel} (2,14) maka H_0 diterima artinya model persamaan regresi memenuhi *Goodness of Fit*.

Pengujian nilai F juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan α . Jika signifikansi $F \leq \alpha$, maka H_0 diterima dan jika signifikansi $F > \alpha$, maka H_0 ditolak. Nilai signifikansi uji F penelitian ini adalah 0,000. Nilai signifikansi $F \leq \alpha$, maka H_0 diterima artinya model persamaan regresi memenuhi *Goodness of Fit*.

c. Koefisien Determinasi Adj R^2

Menurut Ghozali (2011), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai *adjusted* R^2 penelitian ini sebesar 0,366. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, kekayaan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, umur administratif, *diferensiasi fungsional*, spesialisasi pekerjaan dan rasio kemandirian keuangan daerah mampu menjelaskan perubahan tingkat pengungkapan laporan keuangan sebesar 36,6% sedangkan sisanya 63,4% dijelaskan oleh faktor lain.

5. Pembahasan

5.1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap.

5.2. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Patrick (2007) dan Suhardjanto *et al* (2010) yang berpendapat bahwa semakin banyak jumlah legislatif maka proses kooperasi dan koordinasi akan semakin rumit. Kondisi tersebut akan membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengontrol kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan.

5.3. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Kekayaan pemerintah daerah yang diukur dengan PAD belum tentu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan pada laporan keuangan. Kondisi tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat memahami laporan keuangan, hanya masyarakat kalangan tertentu yang memahaminya. Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan masyarakat menengah ke bawah dan dengan tingkat pendidikan yang rendah.

5.4. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan ditolak. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hal ini dapat dikarenakan

pemerintah pusat kurang memberikan kontrol terhadap penggunaan dana perimbangan sehingga Pemda tidak memiliki dorongan untuk meningkatkan pengungkapan dalam laporan keuangan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

5.5. Pengaruh Umur Administratif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa umur administratif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hipotesis awal menyatakan bahwa semakin tua umur suatu daerah semakin tinggi tingkat pengungkapannya sebagai hasil dari pengalaman yang telah lama. Walaupun demikian hal tersebut tidak terbukti akibat adanya sifat monoton dalam penyusunan LKPD..

5.6. Pengaruh Diferensiasi Fungsional terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa *diferensiasi fungsional* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Pemerintah daerah dengan jumlah SKPD yang besar memiliki birokrasi yang lebih kompleks, sehingga tingkat pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di pemerintah daerah dapat dikatakan rendah. Hal ini mengakibatkan besarnya potensi pencatatan yang tidak akurat. Dengan demikian, jumlah SKPD tidak dapat menjadi jaminan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

5.7. Pengaruh Spesialisasi Pekerjaan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang berwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Seharusnya kepala daerah yang berlatar belakang ekonomi, termasuk akuntansi, lebih dapat mengelola keuangan daerah secara lebih baik, tetapi pada kenyataannya masih banyak kepala daerah yang bukan berlatar belakang ekonomi (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa lebih banyak kepala daerah yang tidak berlatar belakang ekonomi. Hal ini menyebabkan kepala daerah tidak memperhatikan pengungkapan laporan keuangan.

Tabel 7
Spesialisasi Pekerjaan

Latar Belakang Pendidik	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	N	%	N	%	N	%
Ekonomi	2	10,5%	2	10,5%	2	10,5%
Bukan Ekonomi	17	89,5%	17	89,5%	17	89,5%

5.8. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan ditolak. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, menunjukkan semakin mandiri

pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tingginya rasio kemandirian keuangan menyebabkan tingkat ketergantungan kepada pihak eksternal menjadi rendah.

6. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
- b. Ukuran legislatif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
- c. Kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
- d. *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
- e. Umur administratif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
- f. *Difrensiasi fungsional* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
- g. Spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
- h. Rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012). Hasil penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) juga menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, *difrensiasi fungsional* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan dan spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan Setyaningrum dan Syafitri (2012) yaitu ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan sedangkan hasil penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan sedangkan penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran legislatif, kekayaan pemerintah daerah dan umur administratif tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan sedangkan hasil penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) menunjukkan bahwa ukuran legislatif, kekayaan pemerintah daerah dan umur administratif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu peneliti tidak memperoleh data aset dan kewajiban pada 15 provinsi. Hal tersebut menyebabkan jumlah sampel penelitian ini hanya 19 provinsi. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya mengandalkan data dari website Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, namun diharapkan mencari data penelitian dari sumber lain sehingga dapat memperoleh semua data penelitian.

Daftar Pustaka

- Bastian, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. INDEKS.
- Dwirandra. (2008). "Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2002-2006", *Jurnal Ilmiah*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Udayana, Denpasar.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19* (Edisi 5). Semarang Indonesia: Penerbit UNDIP.
- Giligan, Thomas W and Matsusaka, Jhon G. (2001). *Fiscal Policy, Legislature Size, and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century*. *National Tax Journal*. Vol. 54: 57-82
- Girsang, Heri Atapson V dan Yuyetta, Etna Nur A. (2015). *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Revisi). Jakarta, Indonesia: Badan Penerbit Salemba Empat.
- Hartono, Jogiyanto. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi 6). Yogyakarta, Indonesia: Penerbit BPFE.
- Hilmi, Amiruddin Zul dan Dwi Martani. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Skripsi, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kusumawardani Media. (2012). *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1. ISSN: 2252-6765.
- Lasward F, Fisher R dan Oyelere P. (2005). *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24; 101-121.
- Lesmana. Sigit I. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Liestiani, A. (2008). *Pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia Untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mamesah, D.J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Mandasari, Putriesti. (2009). *Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesian Local Government*. Tesis Master. Universitas Sebelas Maret.
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. (2013). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret : Surakarta.
- Matsusaka, J. (2001). *Corporate Diversification, Value Maximization, and Organizational Capabilities*. *Journal of Business*, 74, pp.176-211.
- Naim, A., dan F. Rakhman. (2000). *Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.15: 70-82.
- Nasser, Abdul. (2009). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia*. Tesis Universitas Sumatera Utara di Publikasikan.
- Patrick, Patricia A. (2007). *The Determinants of Organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States – Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from *Accounting & Tax Periodicals*. (Publication No. AAT 3266180).
- Poerwadarminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pratama, Kadek A, Desak N, Edy S. (2015). *Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013)*. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Volume 3 No.1.
- Ratnasari, Ayu D. (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK RI terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

- Setyaningrum, D dan Syafitri, F. (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Pelaporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 9, No. 2.
- Sinaga, Y. F. (2011). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemda*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- S. Munawir. (2004). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Ke-4 Liberty, Yogyakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2004). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemda terhadap Kinerja Keuangan Pemda*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Suhardjanto, D dan Yulianingtyas, R. (2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Sebelas Maret.
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., dan Brown, A. (2010). *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities*. Penelitian Hibah Publikasi Internasional, LP2M UNS.
- Suripto, Bambang. (1999). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan*. Simposium Nasional Akuntansi II.
- Truemen, B., and S. Titman. (1998). *An Explanation for Accounting Income Smoothing* *Journal of Accounting Research* 26. (Online), Supplement: 127-139, (<http://www.ssrn.com>), diakses 23 Juli (2012).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Werimon, Simson. (2005). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah*. Artikel. Simposium Nasional Hasil Penelitian Akuntansi 10. Makasar.
- Winarna, Jaka dan Sri Murni. (2007). *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
(www.bpkp.go.id).
(<http://id.wikipedia.org>).
(www.keuda.kemendagri.go.id).